

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak

1. Tinjauan Umum tentang Pengertian Anak

Anak, sebagai istilah, merujuk kepada individu yang sedang berada dalam tahap perkembangan dari saat lahir hingga mencapai usia dewasa. Secara umum, seorang anak adalah individu yang belum mencapai kedewasaan baik dari segi fisik maupun emosional, dan juga belum memiliki tanggung jawab yang setara dengan orang dewasa dalam konteks masyarakat. Pengertian tentang anak sering kali terkait dengan batasan usia tertentu, yang dapat bervariasi dalam konteks hukum dan budaya di berbagai negara. Meskipun definisi umum anak adalah individu yang belum dewasa, tetapi batasan usia yang menandai kedewasaan bervariasi di seluruh dunia. Di beberapa negara, usia 18 tahun dianggap sebagai batas dewasa, sementara di negara lain, batasan usia itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Selain itu, dalam beberapa konteks hukum, pengertian anak juga mencakup anak yang belum mencapai usia tertentu, seperti 16 tahun, untuk tujuan perlindungan khusus.

Pengertian tentang anak memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum, sosial, budaya, dan ekonomi. Ini memengaruhi bagaimana hak-hak anak diakui dan diatur, termasuk hak-hak pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang anak dan

perkembangannya menjadi dasar untuk perancangan kebijakan dan program yang memadai demi kesejahteraan dan perlindungan generasi muda. Oleh karena itu, definisi anak dan pemahaman yang komprehensif tentang mereka sangat penting dalam memastikan hak-hak dan kebutuhan anak-anak diakui dan terpenuhi dengan benar dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Dalam banyak budaya, anak dianggap sebagai individu yang memerlukan perlindungan khusus, perhatian, dan bimbingan untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka yang sehat. Pandangan ini muncul dari pemahaman bahwa anak-anak adalah bagian yang paling rentan dalam masyarakat dan sering kali tidak memiliki kemampuan fisik atau mental yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, orang dewasa, termasuk orang tua, keluarga, dan komunitas, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga kesejahteraan anak-anak. Pemahaman tentang perlunya perlindungan dan perhatian khusus terhadap anak-anak juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Undang-undang dan konvensi seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC) secara tegas mengakui hak-hak anak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut.

Dalam masyarakat, peran orang tua dalam mendidik dan merawat anak-anak sangat penting. Orang tua memiliki tanggung jawab utama

dalam memberikan cinta, perhatian, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak mereka. Di samping itu, peran keluarga dan komunitas juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh kembangnya anak-anak. Dengan demikian, pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan perhatian terhadap anak-anak adalah landasan yang kuat dalam memastikan bahwa generasi muda memiliki peluang yang setara dan kondisi hidup yang sehat.⁶

Hak-hak anak adalah fondasi yang sangat penting dalam masyarakat yang beradab. Mereka mencakup sejumlah aspek krusial dalam kehidupan anak, yang melibatkan hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk terlindungi dari eksploitasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Pemahaman yang benar tentang anak juga mengimplikasikan peran yang harus diemban oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Hak anak atas pendidikan menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sesuai dengan potensi mereka. Hak ini bukan hanya tentang akses ke sekolah, tetapi juga mengenai kualitas pendidikan yang diterima anak-anak. Kesehatan adalah hak anak yang mendasar. Setiap anak berhak mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk perawatan kesehatan pra dan pasca lahir.

Perlindungan anak dari eksploitasi dan pelecehan adalah tanggung

⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999. Hal. 8-12

jawab bersama orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ini mencakup perlindungan dari pekerjaan anak yang tidak sesuai usia, perdagangan anak, dan bentuk eksploitasi lainnya. Kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya adalah hak anak yang mencakup hak untuk berbicara, berpendapat, dan berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Hal ini menciptakan landasan penting bagi pembentukan individu yang mandiri dan berpikiran kritis.⁷ Kesimpulannya, pemahaman tentang hak-hak anak adalah hal yang mendasar dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam memastikan hak-hak ini diakui, dihormati, dan dipenuhi. Hal ini tidak hanya akan membentuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak, tetapi juga akan memperkuat fondasi kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat.

Pengertian tentang anak, terutama dalam konteks undang-undang, membentuk dasar yang sangat penting dalam menyusun perlindungan hukum yang khusus dan mengakui hak-hak yang melekat pada mereka sebagai warga negara. Anak-anak adalah bagian yang rentan dalam masyarakat, dan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak dan kebutuhan mereka merupakan landasan yang kuat untuk memastikan kesejahteraan mereka di berbagai aspek kehidupan. Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, ada undang-undang dan peraturan yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak anak. Undang-undang

⁷ Suharto, Edi dan Edi Suhanda. 2009. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta : Pustaka Society. Hal. 9-12

tersebut memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap anak-anak, serta mengakui hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Pemahaman yang komprehensif tentang anak tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan budaya. Hal ini penting karena anak-anak tumbuh dan berkembang dalam berbagai konteks budaya yang berbeda.

Oleh karena itu, pemahaman ini membantu pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk merancang kebijakan, program, dan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan hak-hak mereka. Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya penting dalam mengakui hak-hak anak sebagai warga negara, tetapi juga dalam melaksanakan tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi generasi muda dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka.⁸

Dalam konteks undang-undang, pengertian anak memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak-hak anak, serta dalam penerapan hukum kesejahteraan anak. Undang-undang Kesejahteraan Anak, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 di Indonesia, umumnya mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini digunakan sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dalam berbagai

⁸ Astuti, M. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak. 2013. Jakarta : P3KS Press. Hal. 17-19

aspek kehidupan mereka.⁹

Pengertian anak dalam hukum mengakui bahwa anak-anak memiliki kebutuhan, kepentingan, dan hak-hak yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, hukum kesejahteraan anak biasanya mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak-hak partisipasi anak dalam kehidupan sosial dan budaya.¹⁰

Pemahaman yang komprehensif tentang anak, terutama saat diterapkan dalam konteks sosial, budaya, dan hukum, memiliki dampak yang sangat signifikan dalam merancang kebijakan, program, dan tindakan yang relevan dengan kebutuhan dan hak-hak anak. Ini berarti bahwa ketika pemangku kebijakan, lembaga pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan memiliki wawasan yang mendalam tentang kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak dalam berbagai konteks, mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk melindungi, mendukung, dan memajukan kesejahteraan anak.

Pemahaman yang komprehensif ini membantu dalam menilai apakah upaya-upaya pemenuhan hak anak sudah sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan sejauh mana kesejahteraan anak-anak tercapai di tingkat lokal. Ini juga memungkinkan pengembangan program-program yang lebih efisien dan tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan anak-

⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999. Hal. 19-21

¹⁰ Mulia Astuti, dkk, *Kebijakan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus : Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh*, Jakarta : P3KS Press : 2013. Hal. 21-27

anak, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, perlindungan, atau partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya.

Selain itu, pemahaman yang holistik tentang anak memperkuat tanggung jawab moral dan hukum kita untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui, dihormati, dan dijaga. Ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak yang optimal, melindungi mereka dari potensi risiko dan eksploitasi, serta membantu mereka tumbuh menjadi warga yang aktif dan berkontribusi dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemahaman yang komprehensif tentang anak adalah dasar yang sangat penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana anak-anak berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya memengaruhi perkembangan mereka, pemerintah, lembaga, dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa ketika kita memahami bagaimana anak-anak merespons pengaruh lingkungan mereka, baik dalam hal keluarga, sekolah, teman sebaya, atau masyarakat secara lebih luas, kita dapat merancang program-program yang berfokus pada kebutuhan dan tantangan yang spesifik yang mereka hadapi.

Misalnya, pemahaman ini dapat membantu dalam mengidentifikasi anak-anak yang mungkin berisiko mengalami ketidaksetaraan dalam

akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, atau perlindungan dari eksploitasi. Dengan demikian, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan anak dapat lebih ditargetkan dan efektif.

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang interaksi anak-anak dengan budaya dan nilai-nilai sosial mereka membantu kita menghormati dan memahami keragaman budaya dalam masyarakat. Ini berarti bahwa program-program yang dirancang untuk anak-anak dapat menghormati dan mendukung kekhasan budaya mereka, sehingga tidak hanya melindungi hak-hak anak, tetapi juga menjaga dan memperkaya warisan budaya mereka.

Dengan kata lain, pemahaman yang komprehensif tentang anak dan interaksi mereka dengan lingkungan sosial dan budaya mereka adalah dasar yang krusial untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang mendukung, aman, dan menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pemahaman ini juga memungkinkan upaya perlindungan dan pemajuan kesejahteraan anak menjadi lebih efektif karena mereka dapat disesuaikan dengan realitas sosial dan budaya di mana anak-anak tumbuh besar. Dengan mengakui perbedaan-perbedaan dalam konteks kehidupan anak-anak, program-program perlindungan dan pendidikan dapat dirancang agar lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.¹¹

¹¹ TB. Rachmat Sentika, Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia

Selain itu, pemahaman yang komprehensif tentang anak juga memastikan bahwa upaya perlindungan dan pemajuan hak-hak anak sesuai dengan standar hukum yang berlaku, termasuk konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak. Ini penting karena hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak sebagai warga negara. Dengan demikian, pemahaman yang holistik tentang anak bukan hanya tentang mengakui hak-hak mereka, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan hukum kita untuk melindungi dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda, yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat dan negara kita di masa depan.¹²

2. Tinjauan Umum tentang Hak Anak yang Belum Dewasa

Hak anak yang belum dewasa adalah seperangkat hak-hak yang secara khusus diberikan kepada individu yang berada dalam fase perkembangan menuju kedewasaan. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Hak-hak anak yang belum dewasa diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) yang telah diratifikasi oleh

Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi, Jurnal Sosioteknologi Edisi 11 Tahun 6, Agustus 2007. Hal. 31-33.

¹² Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011. Hal. 17-23

sebagian besar negara di seluruh dunia.¹³

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam tumbuh kembangnya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Kesejahteraan anak mengacu pada terpenuhinya segala hak dan kebutuhan hidup anak. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya

¹³ Andyka Pratama Bensusil, Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Julii/2015. Hal. 12-17

kebutuhannya terpenuhi. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi ke dalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

1. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, diimunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi disini adalah anak juga berhak untuk menyampaikan aspirasinya, atau dengan kata lain apabila orang tua menyusun suatu rencana, memecahkan masalah, berunding, berdiskusi dan musyawarah, anak juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya dan orang tua wajib mendengarkan

serta mempertimbangkannya.

4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.¹⁴

Selain 4 Hak dasar tersebut diatas, anak juga mempunyai Hak Identitas. Hak Identitas seorang anak tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 5 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Hak atas identitas anak merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di hadapan hukum. Negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anak-anak. Di antaranya membuat akta kelahiran, ialah bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak tentang identitas nama, tempat dan tanggal lahir, siapa orang tuanya serta kewarganegaraannya.

¹⁴ Mulia Astuti, dkk, Kebijakan dan Perlindungan Anak. Studi Kasus : Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh, Jakarta : P3KS Press : 2013. Hal. 25-29

Berdasarkan Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam akta kelahiran”.¹⁵

Hak-hak ini memiliki fondasi yang kuat dalam prinsip-prinsip dasar seperti non- diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak untuk dihormati pendapat anak. Prinsip non- diskriminasi menggarisbawahi bahwa setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau asal usul sosialnya. Artinya, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap anak-anak berdasarkan karakteristik pribadi mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya menghilangkan segala bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dapat merugikan anak-anak. Selanjutnya, prinsip kepentingan terbaik anak menuntut bahwa dalam semua tindakan dan keputusan yang memengaruhi anak, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik mereka. Ini berarti bahwa faktor-faktor seperti kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak harus diperhitungkan secara utama dalam setiap kebijakan atau tindakan yang melibatkan anak.

Prinsip ini memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak dengan sebaik mungkin. Terakhir, hak untuk dihormati pendapat anak mengakui bahwa anak-anak memiliki suara dan pendapat yang perlu didengar dan dihormati. Hal ini tidak

¹⁵ EMPATI : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1 (1), 24 – 32. <https://doi.org/http://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9659>. Hal. 12-21.

berarti bahwa anak-anak memiliki kendali penuh atas setiap keputusan, tetapi mereka memiliki hak untuk menyampaikan pandangan mereka, terutama dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Prinsip ini mendorong partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Ketiga prinsip dasar ini membentuk dasar yang kuat dalam menjaga hak-hak anak dan menjadikan anak sebagai subjek hak asasi manusia yang patut dihormati dan dilindungi dalam segala konteks. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang penting dalam pembuatan undang-undang, kebijakan, dan program-program yang berdampak pada anak-anak, serta dalam menjaga keadilan dan kesetaraan bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka.

Prinsip kepentingan terbaik anak mengacu pada keputusan dan tindakan yang harus diambil demi kebaikan dan perkembangan anak. Hak untuk dihormati pendapat anak mengakui bahwa anak memiliki suara dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam keputusan yang berkaitan dengan perkembangan dan kesejahteraan mereka.¹⁶

Penerapan hak-hak anak yang belum dewasa merupakan tugas bersama yang melibatkan peran penting dari berbagai pihak, termasuk orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait. Orang tua memiliki tanggung jawab langsung terhadap anak-anak mereka dalam

¹⁶ Mulia Astuti & Ahmad Suhendi, Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Jurnal Sosio Konsepsia Vol. 4 No. 1 , September – Desember Tahun 2014. Hal. 25-27.

memberikan perlindungan, dukungan, dan panduan yang diperlukan untuk perkembangan mereka. Orang tua juga harus memastikan bahwa hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dari eksploitasi terpenuhi dengan baik.

Masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak-anak. Hal ini mencakup menciptakan komunitas yang aman dan inklusif, memberikan akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak, serta menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap anak-anak. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak perlu ditingkatkan agar mereka dapat berperan aktif dalam melindungi anak-anak di sekitarnya.

Pemerintah memiliki peran kunci dalam merancang kebijakan dan undang-undang yang melindungi hak-hak anak dan memastikan implementasinya. Pemerintah juga bertanggung jawab atas alokasi sumber daya yang memadai untuk sektor-sektor yang memengaruhi kesejahteraan anak, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, mereka harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengawasi dan mengevaluasi efektivitas program-program yang ditujukan untuk anak-anak.

Lembaga-lembaga terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan hak-hak anak dan memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkannya. Mereka juga dapat berperan dalam advokasi

untuk perubahan kebijakan dan program yang lebih baik demi kesejahteraan anak.

Penerapan hak-hak anak yang belum dewasa adalah upaya bersama yang memerlukan koordinasi dan kerjasama dari semua pihak terkait. Hanya dengan peran yang sinergis dari orang tua, masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait, hak-hak anak dapat dijamin dan terlaksana dengan baik, memberikan dasar yang kokoh bagi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Upaya untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka melibatkan serangkaian tindakan yang bersifat menyeluruh. Salah satu aspek penting adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa takut akan kekerasan atau ancaman. Lingkungan yang aman juga memberikan anak-anak kebebasan untuk mengeksplorasi dunia di sekitar mereka dan belajar dari pengalaman.

Selain itu, akses anak-anak ke layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas sangat penting. Pendidikan yang baik memberikan landasan yang kuat bagi masa depan mereka, sementara layanan kesehatan yang berkualitas memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan sehat dan kuat. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang memadai dan layanan kesehatan yang memadai tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan

kekerasan adalah komitmen yang tak terhindarkan. Ini mencakup perlindungan terhadap pekerjaan anak, perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Setiap anak berhak tumbuh tanpa pengalaman traumatik yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan emosionalnya.

Tidak kalah pentingnya adalah memberikan peluang kepada anak-anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan usia dan perkembangannya. Ini memungkinkan mereka untuk berkembang secara penuh sebagai individu, mengembangkan keterampilan sosial, dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya juga memungkinkan anak-anak untuk mengekspresikan diri dan menghargai keragaman budaya.

Dalam rangka melindungi dan memajukan hak-hak anak, langkah-langkah konkret perlu diambil oleh masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, hak-hak anak dapat dijamin dan kesejahteraan mereka dapat tercapai dengan baik.¹⁷

Pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak yang belum dewasa memiliki peran yang sangat penting dalam konteks penelitian ini. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di

¹⁷ Suharto, Edi dan Edi Suhandi. 2009. *Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak*. Jakarta : Pustaka Society. Hal. 14-17

Desa Kidangbang. Dalam upaya ini, pemahaman komprehensif tentang hak-hak anak yang belum dewasa akan memungkinkan kita untuk melakukan analisis yang lebih akurat terhadap sejauh mana upaya pemenuhan hak-hak anak telah berlangsung di tingkat lokal.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak, kita dapat menilai sejauh mana program-program dan kebijakan yang telah diimplementasikan di Desa Kidangbang telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan mungkin diperlukan dan memberikan landasan yang kuat untuk merekomendasikan tindakan lebih lanjut.

Selain itu, pemahaman komprehensif tentang hak-hak anak juga memungkinkan kita untuk melihat dampak dari implementasi Undang-Undang tersebut pada kesejahteraan anak-anak di Desa Kidangbang. Dengan memeriksa apakah hak-hak anak telah dijamin dan dipenuhi, kita dapat menilai sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, penting untuk menjaga pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak sebagai landasan yang kuat. Hal ini akan memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Desa Kidangbang.

Dengan memahami hak-hak anak yang belum dewasa secara holistik, kita dapat mengidentifikasi dengan lebih tepat apakah tindakan

dan program-program yang dilaksanakan di Desa Kidangbang sudah sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) telah memberikan pedoman yang jelas tentang hak-hak anak, dan penelitian ini dapat menilai sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 sejalan dengan prinsip-prinsip UNCRC.¹⁸

Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak juga membantu kita untuk mengukur sejauh mana kesejahteraan anak-anak telah tercapai. Dalam hal ini, pemahaman ini memungkinkan kita untuk memeriksa apakah anak-anak di Desa Kidangbang telah memperoleh akses yang memadai ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan dari eksploitasi, serta peluang untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya mereka sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak yang belum dewasa bukan hanya menjadi dasar penelitian, tetapi juga merupakan alat yang sangat berharga untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan standar hukum yang berlaku, serta untuk mencapai kesejahteraan anak-anak yang lebih baik di tingkat lokal.¹⁹

¹⁸ Astuti, M. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak. 2013. Jakarta : P3KS Press. Hal. 21-29

¹⁹ EMPATI : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 1 (1), 24 – 32. <https://doi.org/http://doi.org/10.15408/empati.v1i1.9659>. Hal. 12-21

B. Tinjauan tentang Kesejahteraan Anak

1. Pengertian Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia merujuk pada kondisi di mana anak-anak memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal, terutama pada terpenuhinya hak dan kebutuhan pokok anak. Dalam konsep ini, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang tanpa hambatan yang mengganggu, termasuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

Pentingnya kesejahteraan anak tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pertama, kesejahteraan anak mencakup kesehatan fisik dan mental mereka. Anak-anak harus mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, gizi yang baik, dan perawatan yang diperlukan untuk tumbuh dengan baik.

Selain itu, pendidikan juga menjadi bagian integral dari kesejahteraan anak. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan mereka. Mereka harus memiliki akses ke sekolah yang aman dan nyaman serta dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan adalah komponen lain dari kesejahteraan anak yang sangat penting. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi seksual, dan perlakuan kasar lainnya. Mereka juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sesuai

dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.

Dalam konteks hukum Indonesia, kesejahteraan anak menjadi prioritas yang harus dijaga dan dipenuhi. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kesejahteraan anak menjadi kunci dalam merancang kebijakan, program, dan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia merupakan landasan yang kuat untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang mengakui hak-hak dasar anak sebagai prioritas yang tak dapat diabaikan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sebaik-baiknya, serta hak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan yang baik.

Pentingnya konsep kesejahteraan anak dalam konteks hukum Indonesia tidak dapat diremehkan. Undang-Undang tersebut menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan potensi kerentanan. Ini mencakup hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, akses layanan kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan.

Selain itu, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak ini menekankan pentingnya peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah

dalam memastikan kesejahteraan anak terwujud. Ini berarti bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak.

Dalam konteks yang lebih luas, konsep kesejahteraan anak juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, termasuk hak-hak anak, seperti yang dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep kesejahteraan anak merupakan landasan yang kokoh untuk merancang kebijakan, program, dan tindakan yang mendukung masa depan yang lebih baik bagi anak-anak sebagai aset berharga bagi bangsa ini.

Anak-anak merupakan generasi masa depan suatu negara dan masyarakat. Mereka membawa potensi besar untuk berkontribusi positif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, melindungi dan memajukan kesejahteraan anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga investasi jangka panjang dalam perkembangan dan stabilitas negara. Ketika anak-anak diberikan akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan yang aman dan mendukung, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang berpotensi untuk menjadi pemimpin masa depan, ilmuwan, pengusaha, atau profesional di berbagai bidang. Mereka dapat menjadi kekuatan yang mendorong inovasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi,

kekerasan, dan diskriminasi juga membentuk fondasi untuk masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh cinta cenderung menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, peduli terhadap sesama, dan berkontribusi dalam memecahkan masalah sosial.

Dalam konteks ini, pemahaman dan implementasi konsep kesejahteraan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Semua pihak harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan peluang yang setara bagi perkembangan mereka. Dengan demikian, melindungi dan memajukan kesejahteraan anak bukan hanya tentang masa kini, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik, yang berdampak positif pada kemajuan dan stabilitas negara serta peradaban manusia secara keseluruhan.²⁰

Konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia mencerminkan komitmen yang kuat untuk memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Hak-hak ini mencakup hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya hak-hak ini sebagai landasan utama dalam pembangunan anak-anak yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Hak anak atas pendidikan tercermin dalam upaya pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua

²⁰ M. Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk di Hukum" Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU- SPPA), (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Hal. 12-16

anak. Pemerintah berkomitmen untuk menghapuskan hambatan-hambatan yang dapat menghambat akses pendidikan anak, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini sejalan dengan visi bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang dapat membantu mereka mencapai potensi maksimalnya.

Selain itu, konsep kesejahteraan anak juga melibatkan hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Pemerintah telah menetapkan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pelecehan, eksploitasi seksual, dan kekerasan lainnya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak yang optimal.

Hak anak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya juga ditekankan dalam konsep kesejahteraan anak. Ini berarti memberikan anak-anak kesempatan untuk berbicara, berpendapat, dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Ini adalah bagian dari pembentukan individu yang aktif, berpikir kritis, dan peduli terhadap masyarakatnya.

Konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia adalah sebuah komitmen untuk memenuhi hak-hak anak secara komprehensif dan merata. Ini mencerminkan visi bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, tanpa diskriminasi, eksploitasi, atau kekerasan. Konsep ini menjadi fondasi bagi upaya

pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan memajukan generasi muda Indonesia.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang kesejahteraan anak, pemerintah, lembaga, dan masyarakat memiliki landasan yang kokoh untuk merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk melindungi, memenuhi hak, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak yang sehat dan bahagia. Pemahaman ini adalah kunci untuk merespons kebutuhan anak dengan tepat dan efektif.

Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara, memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan pemahaman ini ke dalam tindakan konkret. Hal ini mencakup pembuatan undang-undang dan peraturan yang melindungi hak-hak anak, alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang mempengaruhi kesejahteraan anak, dan pengawasan implementasi kebijakan tersebut.

Lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan, juga memiliki peran penting dalam menerjemahkan pemahaman tentang kesejahteraan anak menjadi tindakan nyata. Mereka harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang mereka butuhkan.

Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, peran orang tua dalam

mendidik anak-anak dengan baik, serta dukungan komunitas bagi anak-anak yang memerlukan bantuan khusus, semuanya berperan dalam memastikan kesejahteraan anak.

Dengan pemahaman yang mendalam ini, pemerintah, lembaga, dan masyarakat dapat bekerja bersama-sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak. Mereka dapat merancang kebijakan, program, dan tindakan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, memberikan kontribusi positif pada masyarakat, dan membantu membangun bangsa yang lebih kuat.

Dengan demikian, pemahaman dan implementasi konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta menjadi warga negara yang tangguh dan berdaya saing. Ini juga merupakan wujud dari komitmen moral dan hukum untuk melindungi generasi muda dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka, sesuai dengan standar hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal.²¹

2. Kebutuhan Dasar Anak yang Harus Dipenuhi oleh Orang Tua sebagai bentuk Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak

Kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia adalah konsep yang

²¹ Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011. Hal. 15-19

sangat penting. Ini mencerminkan kondisi di mana anak-anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Di dalamnya terkandung harapan bahwa setiap anak dapat mencapai potensinya yang penuh, bebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

Kesejahteraan anak bukanlah sekadar ketiadaan masalah, melainkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. Ini berarti memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan yang memadai. Ini juga melibatkan perlindungan mereka dari eksploitasi, baik yang terkait dengan pekerjaan anak, perdagangan manusia, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Kesejahteraan anak juga berarti menciptakan lingkungan yang aman, di mana anak-anak dapat tumbuh tanpa rasa takut dan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan usia dan perkembangannya. Ini mencakup hak anak untuk memiliki pendapat mereka dihormati dan diberikan tempat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Kesejahteraan anak adalah investasi dalam masa depan suatu bangsa. Anak-anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif dalam pembangunan dan kemajuan negara. Dengan memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, kita sedang membangun dasar yang kuat untuk perkembangan dan stabilitas masa depan. Oleh karena itu, penting untuk

memahami dan melindungi konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia.

Konsep kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah landasan hukum yang sangat penting dalam konteks Indonesia. Undang-Undang ini mengakui hak-hak anak sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus. Konsep kesejahteraan anak yang diwujudkan dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang tersebut juga mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman, perlakuan tidak adil, dan kekerasan. Ini mencakup hak mereka untuk mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan yang baik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pentingnya konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia tidak dapat diabaikan.

Konsep ini bukan hanya sekadar pernyataan prinsip, melainkan merupakan panduan bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam melindungi dan memajukan hak-hak anak. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, memastikan akses mereka ke layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta melindungi mereka dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Konsep kesejahteraan anak dalam konteks hukum Indonesia bukanlah sekadar suatu ide yang abstrak, melainkan merupakan fondasi yang kokoh untuk merancang kebijakan dan program yang bertujuan utama: memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Dalam realitasnya, konsep ini adalah komitmen bersama pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait dalam menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, sehingga mereka dapat menggali potensi mereka sepenuhnya.

Konsep kesejahteraan anak menjadi pendorong utama di balik kebijakan-kebijakan yang menjaga hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Dalam arti yang lebih konkret, ini berarti memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Kesejahteraan anak juga mencakup hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan tahap perkembangannya, sehingga mereka dapat belajar, berinteraksi, dan berkembang sebagai individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.

Dalam konteks hukum Indonesia, konsep kesejahteraan anak adalah pedoman yang sangat berharga bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan semua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak. Ini

adalah kompas moral yang membimbing langkah-langkah yang diambil untuk melindungi dan memajukan hak-hak anak. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya memahami konsep ini, tetapi juga menjadikannya landasan kuat dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung anak-anak dalam mencapai potensi mereka yang penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Komitmen terhadap kesejahteraan anak adalah investasi tak ternilai bagi masa depan negara. Anak-anak bukan hanya penerus generasi, tetapi juga pilar-pilar utama dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Mereka memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, konsep kesejahteraan anak harus dijunjung tinggi dalam setiap lapisan masyarakat.

Pentingnya konsep ini mencuat dalam pengakuan bahwa anak-anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Hak-hak ini mencakup hak atas pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, perlindungan dari eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Upaya untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya adalah cermin dari komitmen kita terhadap masa depan yang lebih cerah.

Untuk mewujudkan komitmen ini, pemahaman yang mendalam tentang konsep kesejahteraan anak adalah kunci. Ini memungkinkan kita untuk merancang kebijakan, program, dan tindakan yang sesuai dengan

kebutuhan dan hak-hak anak. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait harus bersatu dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak dengan sepenuh hati. Dengan begitu, kita dapat membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan anak yang sehat, bahagia, dan mampu mewujudkan potensi mereka sepenuhnya.

Anak-anak adalah generasi penerus negara dan masyarakat. Mereka adalah aset berharga yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi positif dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Dalam diri mereka terkandung bakat, kreativitas, dan semangat yang bisa menjadi pendorong perubahan positif. Oleh karena itu, melindungi dan memajukan kesejahteraan anak bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam perkembangan dan stabilitas negara.

Pentingnya perhatian dan tindakan untuk anak-anak tercermin dalam pengakuan bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Hak-hak ini mencakup hak atas pendidikan yang berkualitas, akses ke layanan kesehatan yang baik, perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Mewujudkan hak-hak ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif kita sebagai masyarakat dan negara.

Investasi dalam kesejahteraan anak membawa dampak jauh ke depan. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, ilmuwan, pekerja keras, dan warga

yang bertanggung jawab di masa depan. Mereka membentuk fondasi dari kemajuan bangsa. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak adalah langkah yang membangun dasar yang kokoh bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik negara kita.²²

Konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia mencerminkan komitmen yang mendalam untuk memenuhi hak-hak anak sebagai anggota masyarakat yang berharga. Hak-hak ini termasuk hak atas pendidikan yang berkualitas, akses ke layanan kesehatan yang memadai, perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan budaya.

Hak atas pendidikan adalah hak fundamental setiap anak. Dengan hak ini, anak memiliki akses ke pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi mereka. Pendidikan yang berkualitas adalah investasi dalam masa depan anak-anak dan bangsa. Kesejahteraan anak juga mencakup akses mereka ke layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

Perlindungan anak dari eksploitasi adalah aspek penting dalam konsep kesejahteraan anak. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan, perdagangan manusia, kerja paksa, dan bentuk eksploitasi lainnya. Hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman

²² Iman, C. H.; W. (2016). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE : Kajian Ilmiah Hukum*, 1(1), 149–171. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v1i1.417>. Hal. 27-29

adalah hak dasar yang harus dijamin untuk setiap anak.

Selain hak-hak tersebut, anak-anak juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Mereka memiliki kemampuan untuk berbicara, berpendapat, dan terlibat dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Memberikan anak kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat adalah bagian integral dari menciptakan kesejahteraan mereka.

Dalam esensi, konsep kesejahteraan anak mencerminkan tekad untuk memberikan anak-anak kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini adalah komitmen moral dan hukum yang membutuhkan perhatian dan tindakan terus-menerus dari masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak diakui, dihormati, dan dipenuhi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kesejahteraan anak, pemerintah, lembaga, dan masyarakat memiliki landasan yang kokoh untuk merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak yang sehat dan bahagia.

Pemahaman ini berfungsi sebagai panduan untuk memprioritaskan kepentingan anak dalam setiap langkah yang diambil. Dengan pemahaman yang baik tentang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, pemerintah dapat merancang kebijakan yang memastikan akses mereka ke pendidikan yang

berkualitas, perawatan kesehatan yang memadai, dan perlindungan dari berbagai bentuk risiko dan eksploitasi.

Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dapat menggunakan pemahaman ini sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas program yang ada dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil bagi anak-anak. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan dan program ini dengan memahami pentingnya kesejahteraan anak dan mengambil bagian dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dalam konteks yang lebih panjang, pemahaman tentang kesejahteraan anak tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak saat ini, tetapi juga berinvestasi dalam masa depan negara. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik memiliki potensi untuk menjadi anggota produktif dan berkontribusi dalam masyarakat, menciptakan stabilitas dan kemajuan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kesejahteraan anak adalah pondasi penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemahaman dan implementasi konsep kesejahteraan anak dalam hukum Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta menjadi warga negara yang tangguh dan berdaya saing.

Pentingnya pemahaman ini adalah bahwa anak-anak merupakan aset berharga bagi bangsa dan masyarakat. Dengan memberikan mereka

lingkungan yang aman, hak-hak yang diakui, dan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kita memberi mereka peluang untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak positif pada kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan negara.

Implementasi konsep kesejahteraan anak juga mencerminkan komitmen moral dan hukum untuk melindungi generasi muda. Ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan seluruh lembaga terkait. Melalui kebijakan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak, kita menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menjaga dan memajukan kesejahteraan anak-anak. Konsep kesejahteraan anak memiliki makna yang lebih dalam karena sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Prinsip ini dengan tegas menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang asal usul sosial, ras, jenis kelamin, atau agama mereka, memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil.

Prinsip non-diskriminasi adalah salah satu pilar utama hak asasi manusia. Ini berarti tidak ada alasan yang sah untuk membedakan perlakuan terhadap anak-anak berdasarkan karakteristik pribadi mereka. Semua anak memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Selain itu, konsep kesejahteraan anak juga menekankan prinsip kepentingan terbaik anak. Ini berarti keputusan dan tindakan yang memengaruhi anak harus didasarkan pada pertimbangan

terbaik bagi anak tersebut. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa kepentingan anak harus ditempatkan di atas segala hal dalam pengambilan keputusan yang melibatkan mereka.

Dengan menjunjung tinggi konsep kesejahteraan anak dalam konteks hak asasi manusia, kita tidak hanya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, tetapi juga menghormati martabat setiap individu. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, tanpa rasa takut akan diskriminasi atau ketidakadilan. Dengan demikian, konsep kesejahteraan anak adalah pilar utama dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pemahaman dan implementasi konsep kesejahteraan anak merupakan langkah konkret yang sangat penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Konsep ini tidak hanya relevan dalam ranah moral, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada kemajuan dan stabilitas negara secara keseluruhan. Ketika setiap anak memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, perlindungan dari eksploitasi, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya, maka bangsa ini akan menjadi lebih kuat. Anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik memiliki potensi yang besar untuk menjadi warga negara yang berdaya saing, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif dalam pembangunan negara.

Selain itu, dengan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik anak, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan pada hak asasi manusia. Ini adalah fondasi yang kokoh bagi kemajuan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi konsep kesejahteraan anak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi jangka panjang dalam masa depan Indonesia yang lebih baik.

Dalam konteks global yang semakin terhubung, Indonesia juga akan mendapatkan apresiasi lebih besar sebagai negara yang peduli terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Ini akan memperkuat citra positif Indonesia di mata dunia dan memungkinkan kerja sama yang lebih baik dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang.

Sebagai tanda komitmen moral dan hukum untuk melindungi generasi muda, pemahaman dan implementasi konsep kesejahteraan anak adalah tonggak penting dalam memandu negara ini menuju masa depan yang lebih cerah, di mana hak-hak anak-anak diperlakukan dengan sepenuhnya dan nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi.²³

C. Tinjauan Teori Efektivitas Hukum

Tinjauan teori tentang efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum dan peraturan yang ada dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam masyarakat. Efektivitas hukum merupakan indikator penting dalam menilai apakah suatu sistem hukum berfungsi dengan baik

²³ Arliman S, L. (2018). Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17 (2). Hal. 25-29

atau tidak. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, efektivitas hukum menjadi sangat relevan karena undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan anak-anak. Efektivitas hukum berkaitan dengan implementasi undang-undang. Undang-undang yang ada harus dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah dan lembaga terkait. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, alokasi sumber daya yang cukup, serta mekanisme penegakan hukum yang efisien. Jika undang-undang hanya berupa teks tanpa implementasi yang efektif, maka hak-hak anak yang diakui dalam undang-undang tersebut mungkin tidak akan terwujud.²⁴

Efektivitas hukum melibatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak yang diakui dalam undang-undang. Masyarakat harus tahu bahwa undang-undang tersebut ada, apa isinya, dan bagaimana mereka dapat mengakses hak-hak anak mereka. Pendidikan publik tentang hak-hak anak dan peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hak anak juga menjadi faktor penting dalam efektivitas hukum. Efektivitas hukum mencakup akses yang setara terhadap sistem peradilan. Anak-anak dan keluarga mereka harus dapat dengan mudah mengakses sistem peradilan jika hak-hak mereka dilanggar. Ini termasuk memiliki akses yang adil dan setara terhadap proses peradilan, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan

²⁴ Organisasi Perburuhan Internasional, Serikat Pekerja/Serikat Buruh & Pekerja Anak, 2009. Hal. 12-18.

retaliasi.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, tinjauan teori tentang efektivitas hukum menjadi kerangka kerja yang relevan untuk mengevaluasi sejauh mana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah berhasil dalam melindungi dan memajukan hak-hak anak di Desa Kidangbang. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam konteks ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di tingkat lokal. Teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini juga peneliti gunakan sebagai parameter atau tolak ukur untuk mengukur sejauh mana Pasal 1 ayat 1 dan 2 serta pasal 2 dalam UU Kesejahteraan Anak diimplementasikan di Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak.

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas hukum, terutama dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Penegak hukum, yang meliputi kepolisian, jaksa, dan aparat penegak lainnya, adalah garda terdepan dalam melindungi hak-hak anak dan menerapkan hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Salah satu peran utama penegak hukum adalah melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak “ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013). Hal. 18-22

tentang hukum yang berkaitan dengan anak-anak, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dan dapat mengidentifikasi situasi-situasi di mana anak-anak rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, atau diskriminasi.

Selain itu, penegak hukum juga harus memiliki keterampilan interpersonal yang baik, terutama ketika berhadapan langsung dengan anak-anak yang menjadi korban atau saksi dalam kasus-kasus tersebut. Sensitivitas terhadap kebutuhan dan perasaan anak-anak adalah aspek penting dari pekerjaan mereka, karena ini dapat memengaruhi kenyamanan anak-anak dalam berbicara tentang pengalaman mereka. Peningkatan pelatihan dan kapasitas penegak hukum dalam hal hak-hak anak dan teknik wawancara yang sesuai dengan usia anak adalah investasi penting. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat dalam sistem penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian dalam perlindungan anak-anak.

Dalam kesimpulan, faktor penegak hukum adalah komponen kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Mereka adalah pilar penting dalam perlindungan hak-hak anak dan penerapan hukum yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan kepekaan terhadap kebutuhan anak-anak, penegak hukum dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif demi

melindungi generasi muda dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

Para penegak hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, dan hakim, memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan hukum dan melindungi hak-hak anak-anak. Aparat kepolisian memiliki peran awal dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Mereka bertugas untuk menyelidiki tindakan kriminal yang melibatkan anak-anak, seperti kasus kekerasan atau eksploitasi.

Kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus ini dengan cepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak menjadi sangat penting. Jaksa memiliki peran dalam memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan anak-anak diperiksa secara seksama dan proses hukum berjalan dengan adil. Mereka harus memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses peradilan, termasuk hak untuk memiliki pendamping hukum yang kompeten dan hak untuk diadili dengan cara yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka. Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai faktor utama dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Pemahaman yang mendalam tentang hak anak, prinsip-prinsip konvensi hak anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah kunci dalam menjalankan peran ini. Faktor penegak hukum yang kompeten, sensitif terhadap isu anak, dan berkomitmen untuk melindungi

hak-hak mereka adalah fondasi yang diperlukan untuk menjalankan undang-undang yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, pelatihan yang memadai dan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu anak di kalangan penegak hukum menjadi sangat penting. Mereka harus mampu menjalankan tugas mereka dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak anak, keadilan, dan perlindungan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang rentan dan membutuhkan.²⁶

2. Faktor Sarana atau Prasarana

Sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di tingkat lokal. Sarana dan prasarana yang memadai adalah fondasi yang sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung upaya perlindungan dan pemajuan kesejahteraan anak. Pertama-tama, memiliki sarana fisik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan rekreasi yang memadai adalah kunci dalam memastikan anak-anak dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan. Fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau akan membantu menjaga kesehatan anak-anak, sedangkan akses ke pendidikan yang baik akan membuka peluang pendidikan yang setara bagi semua anak. Selain itu, adanya sarana rekreasi yang aman dan bermanfaat juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung

²⁶ M. Nasir Djamil, "Anak Bukan Untuk di Hukum" Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Hal. 12-16

perkembangan fisik dan sosial anak-anak.

Selain sarana fisik, prasarana administratif juga sangat penting. Ini mencakup sistem pelaporan, pengawasan, dan penegakan hukum yang efisien. Dengan adanya prasarana administratif yang baik, kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak dapat dilaporkan, diselidiki, dan ditindaklanjuti dengan cepat dan adil. Pemerintah daerah dan lembaga terkait perlu memiliki kapasitas untuk mengelola data dan informasi terkait anak dengan baik agar kebijakan dan program yang relevan dapat dirancang.

Selanjutnya, pelatihan dan kesadaran bagi para profesional yang bekerja dengan anak-anak juga merupakan bagian penting dari prasarana. Guru, tenaga medis, pekerja sosial, dan semua yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak harus memiliki pemahaman yang baik tentang hak-hak anak, tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi, dan cara melaporkan atau mengatasi situasi-situasi tersebut. Ini akan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan mendukung perkembangan mereka.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung upaya perlindungan dan pemajuan kesejahteraan anak, investasi dalam sarana dan prasarana yang memadai adalah hal yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang mematuhi undang-undang, tetapi juga tentang memberikan fondasi yang kuat bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan bahagia, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi

positif pada masa depan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Sarana kesehatan yang baik adalah elemen penting dalam pemenuhan hak kesehatan anak. Adanya fasilitas kesehatan yang terjangkau, tenaga medis yang kompeten, dan akses yang mudah menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa anak-anak dapat menerima perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Selain itu, program imunisasi, pelayanan antenatal, dan pencegahan penyakit menjadi bagian integral dari kesejahteraan anak. Sarana pendidikan yang memadai merupakan unsur kunci dalam pemenuhan hak pendidikan anak. Sekolah-sekolah yang berkualitas, guru yang terlatih, dan akses yang setara terhadap pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam perkembangan anak. Pendidikan yang baik memberikan anak-anak pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk masa depan yang lebih baik.

Sarana dan prasarana sosial juga penting dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Program dukungan sosial, seperti layanan konseling dan rehabilitasi, dapat membantu anak-anak yang mengalami situasi sulit. Selain itu, pusat-pusat perlindungan anak dan pelayanan darurat menjadi sarana yang sangat penting dalam situasi darurat atau krisis. Faktor sarana dan prasarana yang memadai menciptakan landasan fisik dan sosial yang kokoh untuk pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan sosial menjadi sangat penting dalam upaya memastikan

bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 dapat diimplementasikan dengan efektif dan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.²⁷

3. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak dapat diabaikan. Faktor masyarakat menjadi elemen kunci dalam perlindungan dan pemajuan hak-hak anak di tingkat lokal. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak sangat penting. Masyarakat perlu tahu apa yang diatur dalam undang-undang, termasuk hak-hak yang diakui oleh anak sebagai warga negara.

Pemahaman ini mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta kepentingan terbaik anak. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Peran masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pelanggaran hak anak tidak bisa diremehkan. Masyarakat seringkali menjadi saksi pertama ketika kasus kekerasan atau penelantaran terjadi. Penting bagi masyarakat memiliki saluran komunikasi yang aman dan efisien untuk melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah penting, terutama yang berkaitan dengan kejahatan, pelanggaran hukum, atau situasi yang membahayakan kesejahteraan individu atau masyarakat secara umum.

²⁷ Imron, A. (2013). *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan di bawah Umur*. Al-Tahrir, 13(2), 253–272. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.16>. Hal. 21-23

Saluran komunikasi yang efektif untuk melaporkan kasus-kasus seperti ini merupakan komponen kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Ketika warga memiliki jalan yang jelas dan aman untuk melaporkan tindakan kriminal atau perilaku yang tidak etis, maka potensi untuk penegakan hukum yang adil dan keputusan yang bijaksana menjadi lebih besar. Ini juga dapat meminimalkan risiko konflik atau tindakan balas dendam yang mungkin timbul jika masalah ini tidak diatasi secara tepat waktu.

Selain itu, saluran komunikasi yang efisien juga penting dalam mendukung perlindungan hak-hak individu yang rentan atau yang mungkin menjadi korban penyalahgunaan atau diskriminasi. Masyarakat harus tahu bahwa mereka dapat melaporkan situasi yang mengancam kesejahteraan anak-anak, perempuan, kelompok minoritas, atau siapa pun yang membutuhkan perlindungan ekstra, tanpa takut akan reaksi negatif atau represi.

Dalam era digital saat ini, teknologi informasi dan jejaring sosial juga telah membuka peluang baru untuk melaporkan kasus-kasus tersebut secara anonim atau melalui platform yang mudah diakses. Ini membuat saluran komunikasi semakin inklusif dan memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam rangka menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, pemerintah dan lembaga yang berwenang perlu secara aktif mempromosikan dan memfasilitasi akses masyarakat ke

saluran komunikasi ini, serta menangani laporan-laporan tersebut dengan cepat dan adil. Dengan demikian, saluran komunikasi yang aman dan efisien akan menjadi alat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil, aman, dan bertanggung jawab.

Dukungan masyarakat terhadap program-program perlindungan anak dan pelayanan sosial sangat diperlukan. Dengan aktif terlibat dalam program-program ini, masyarakat dapat membantu anak-anak yang mengalami situasi sulit, seperti anak-anak yang terlantar atau korban kekerasan.

Selain itu, masyarakat juga dapat mendukung upaya-upaya pemajuan kesejahteraan anak, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Faktor masyarakat adalah elemen penting dalam mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dari sekadar teks hukum menjadi kenyataan yang bermanfaat bagi anak-anak di tingkat lokal. Dengan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat yang kuat, upaya perlindungan dan pemajuan hak anak dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.²⁸

4. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki dampak signifikan dalam konteks perlindungan dan pemajuan hak-hak anak, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di Indonesia. Budaya lokal, nilai-nilai tradisional, dan norma-norma sosial dapat

²⁸ Organisasi Perburuhan Internasional, Serikat Pekerja/Serikat Buruh & Pekerja Anak, 2009. Hal. 14-19

memengaruhi cara masyarakat memperlakukan anak-anak dan memahami hak-hak mereka. Budaya dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap peran dan status anak dalam masyarakat.

Beberapa budaya mungkin memiliki norma-norma yang menghargai anak-anak sebagai anggota masyarakat yang setara, sementara budaya lain mungkin menempatkan anak-anak dalam posisi yang lebih rendah. Pemahaman ini dapat memengaruhi tingkat perlindungan dan pemenuhan hak anak. Budaya juga dapat memengaruhi pendekatan dalam mendidik anak-anak. Cara mendidik yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat mencerminkan nilai-nilai budaya tertentu.

Oleh karena itu, dalam upaya memahami bagaimana hak pendidikan anak dijalankan, penting untuk mempertimbangkan faktor budaya yang memengaruhi praktik pendidikan. Dalam situasi tertentu, budaya dapat digunakan sebagai pembenaran untuk praktik-praktik yang merugikan anak-anak, seperti perkawinan anak, pekerjaan anak, atau perlakuan diskriminatif. Memahami faktor kebudayaan yang memengaruhi praktik-praktik ini adalah langkah penting dalam mengatasi permasalahan tersebut dan mempromosikan perubahan sosial yang positif. Faktor kebudayaan tidak selalu bertentangan dengan perlindungan dan pemajuan hak anak. Sebaliknya, mereka dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap hak anak.

Oleh karena itu, dalam implementasi Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979, penting untuk memahami dan mengintegrasikan faktor kebudayaan dalam upaya-upaya pemenuhan hak anak. Pentingnya memahami faktor kebudayaan terletak pada kemampuan untuk menyesuaikan program dan kebijakan perlindungan anak dengan nilai-nilai lokal dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, program-program perlindungan anak dapat lebih diterima dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Selain itu, pemahaman tentang budaya lokal dapat membantu mengidentifikasi praktik-praktik yang merugikan anak-anak yang mungkin dilakukan atas alasan budaya, dan kemudian mengupayakan perubahan yang sesuai. Integrasi faktor kebudayaan juga dapat menjadi alat untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak di tingkat lokal. Menggunakan pendekatan yang menghormati budaya lokal dapat memungkinkan dialog yang lebih terbuka dan kolaboratif antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam upaya pemajuan kesejahteraan anak.

Dalam kesimpulannya, pemahaman dan integrasi faktor kebudayaan bukanlah hambatan, tetapi merupakan langkah penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Hal ini tidak hanya akan memastikan perlindungan hak anak yang lebih baik, tetapi juga membantu membangun kesejahteraan anak yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat.²⁹

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak “ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2013). Hal. 28-32